

IMPLEMENTASI ILMU EKONOMI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PAREPARE

*Implementation of Economic Science at the Public Works and Spatial Planning
Office (PUPR) of Parepare City*

Siti Ismi Salsa Difa¹, Zafitri Nur Vadilla², Ryandra Hibra Ismail³, Nasrul⁴, Yasri Tarawiru⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Parepare

⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan Kode
Pos 91112

Email: sitiismisalsadifa54@gmail.com¹, zafitrinurvadilla114@gmail.com²,
ryandrahibraismail53@gmail.com³, asrulpmb2022@gmail.com⁴, yasri.se.ak@gmail.com⁵

Abstrak

Kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare memberikan gambaran nyata tentang penerapan ilmu ekonomi dalam lingkungan kerja pemerintahan. Kajian ini mengidentifikasi beberapa tantangan, antara lain terbatasnya penerapan analisis ekonomi dalam penyusunan anggaran, kurangnya koordinasi antarbidang, dan belum optimalnya pemanfaatan data ekonomi sebagai dasar perencanaan program pembangunan. Solusi yang diusulkan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan digitalisasi administrasi, penerapan pembagian tugas berbasis kompetensi, serta perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning). Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu ekonomi berperan penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi prinsip-prinsip ekonomi dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program menjadi hal yang esensial untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Implementasi Ekonomi, Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ekonomi Pembangunan

Abstract

Based on internship activities and field observations, the study identifies several challenges, including the limited use of economic analysis in budget formulation, insufficient coordination across divisions, and the inadequate utilization of economic data as a foundation for development program planning. Proposed solutions include strengthening institutional capacity, enhancing administrative digitalization, implementing competency-based task distribution, and applying evidence-based development planning. The findings indicate that economics plays a crucial role in improving government governance, particularly in supporting effective infrastructure development and public service delivery. Therefore, institutional capacity building and the integration of economic principles into every stage of planning and program implementation are essential to achieving regional development goals.

Keywords: Economic Implementation, Financial Management, Human Resource Management, Economic Development

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan fondasi tata kelola yang kuat, di mana penerapan ilmu ekonomi menjadi salah satu pilar utamanya. Dalam konteks pemerintahan, ilmu ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis kebijakan, tetapi juga sebagai kerangka berpikir sistematis dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Prinsip-prinsip dasar ekonomi seperti efisiensi alokasi sumber daya, analisis biaya-manfaat, dan optimalisasi pengeluaran publik menjadi instrumen penting yang harus dikuasai oleh aparatur pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap konsep-konsep ekonomi ini, risiko pemborosan anggaran dan rendahnya dampak program pembangunan menjadi tidak terhindarkan (Luthfi et al., 2024).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur

yang berkualitas. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan, jembatan, drainase, bangunan gedung, serta tata ruang wilayah, PUPR dituntut untuk mampu mengelola anggaran dalam skala besar secara transparan dan akuntabel. Besarnya volume anggaran yang dikelola PUPR menjadikan penerapan prinsip *value for money* mencakup dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada rendahnya kualitas infrastruktur yang dihasilkan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Nurhumaerah et al., 2023).

Di tingkat daerah, Kota Parepare sebagai kota menengah di Sulawesi Selatan menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pembangunan. Dengan posisi strategis sebagai kota penghubung antara kawasan selatan dan utara Sulawesi Selatan, Parepare membutuhkan infrastruktur yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Data Badan Pusat Statistik Kota Parepare menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, peran PUPR Kota Parepare dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat menjadi sangat krusial (Fitri et al., 2024).

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia aparatur, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan kompetensi ekonomi dalam pekerjaan pemerintahan dengan latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai di instansi teknis seperti PUPR. Banyak pegawai yang berlatar belakang teknik sipil atau arsitektur, namun harus berhadapan dengan tugas-tugas administratif dan perencanaan yang membutuhkan pemahaman ekonomi, seperti penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisis kelayakan proyek, dan evaluasi kinerja program. Kesenjangan kompetensi ini menjadi salah satu faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip ekonomi secara optimal dalam operasional dinas. Kondisi ini juga menjadi latar belakang pentingnya program magang mahasiswa ilmu ekonomi di lingkungan instansi pemerintah seperti PUPR, karena mahasiswa dapat berkontribusi dalam mengisi gap kompetensi tersebut sekaligus memperoleh pengalaman praktis yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan (Rahmadi, 2025).

Program magang atau praktik kerja lapangan merupakan salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang diakui secara luas efektivitasnya dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Melalui magang, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan *soft skills* seperti kemampuan komunikasi, adaptasi terhadap budaya organisasi, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan dalam situasi nyata. Dalam konteks mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, magang di instansi pemerintah seperti PUPR memberikan peluang untuk mengaplikasikan secara langsung konsep-konsep yang telah dipelajari, mulai dari ekonomi publik, manajemen keuangan daerah, hingga perencanaan pembangunan wilayah (Setiawati et al., 2022).

Penelitian dan kajian mengenai implementasi ilmu ekonomi dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia masih relatif terbatas, khususnya yang berfokus pada level pemerintah kota dan menelaah dari perspektif mahasiswa magang. Sebagian besar kajian yang ada lebih berfokus pada analisis kebijakan fiskal tingkat nasional atau evaluasi program pembangunan secara makro. Padahal, pemahaman terhadap dinamika implementasi ekonomi di level operasional instansi sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan nyata yang dihadapi birokrasi dan merumuskan solusi yang aplikatif. Dengan demikian, kajian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis berbasis pengalaman langsung di lapangan yang diharapkan dapat memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan daerah berbasis prinsip ekonomi (Iqbal et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi partisipatif dan studi lapangan (*field study*). Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer berupa observasi langsung selama kegiatan magang di Dinas PUPR Kota Parepare dan data sekunder berupa dokumen resmi instansi, laporan anggaran, serta literatur terkait. Kegiatan magang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan dengan keterlibatan langsung pada berbagai bidang kerja di lingkungan Dinas PUPR, meliputi bidang perencanaan, administrasi keuangan, dan pengelolaan program pembangunan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara membandingkan kondisi aktual di lapangan dengan teori-teori ekonomi yang relevan, mencakup aspek manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan ekonomi pembangunan. Proses identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan terhadap mekanisme kerja, koordinasi antarbidang, serta pengelolaan anggaran dan data di lingkungan instansi. Selanjutnya, solusi alternatif dirumuskan berdasarkan

analisis kesenjangan antara kondisi ideal secara teoritis dengan kondisi riil yang ditemukan selama kegiatan magang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Manajemen Keuangan di Dinas PUPR Kota Parepare

Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan instansi pemerintah, karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak dan retribusi masyarakat. Di Dinas PUPR Kota Parepare, pengelolaan keuangan mencakup seluruh siklus anggaran mulai dari perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*actuating*), hingga pertanggungjawaban (*accountability*). Berdasarkan hasil observasi selama magang, ditemukan bahwa siklus anggaran di PUPR Parepare pada umumnya telah mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal penerapan instrumen analisis ekonomi yang lebih komprehensif dalam setiap tahapan siklus tersebut.

Salah satu temuan utama adalah belum diterapkannya analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) secara sistematis dalam proses perencanaan program. Pengambilan keputusan terkait prioritas program masih lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politis dan usulan dari kelurahan atau kecamatan, tanpa didukung oleh kajian ekonomi yang mendalam mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi landasan manajemen keuangan publik yang baik. Sebagai perbandingan, kajian oleh Asmara et al. menunjukkan bahwa instansi PUPR di daerah lain yang telah menerapkan analisis kelayakan ekonomi dalam penentuan prioritas program terbukti mampu menghasilkan output pembangunan yang lebih optimal dengan anggaran yang sama (Nurhumaerah et al., 2023).

Tabel 1. Kondisi Manajemen Keuangan PUPR Kota Parepare

Aspek	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal	Gap
Perencanaan Anggaran	Berbasis usulan bottom-up tanpa analisis ekonomi mendalam	Berbasis cost-benefit analysis dan indikator prioritas	Belum ada instrumen analisis ekonomi baku
Digitalisasi Keuangan	SIPD sudah digunakan, namun belum optimal di semua bidang	Seluruh proses keuangan terintegrasi digital real-time	Konsistensi penggunaan SIPD perlu ditingkatkan
Transparansi & Akuntabilitas	Laporan keuangan disusun sesuai regulasi	Laporan keuangan mudah diakses publik secara daring	Aksesibilitas informasi keuangan masih terbatas
Evaluasi Kinerja Anggaran	Evaluasi dilakukan akhir tahun	Monitoring berkala per triwulan dengan indikator terukur	Belum ada sistem evaluasi berbasis KPI keuangan

Di sisi digitalisasi keuangan, PUPR Kota Parepare telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, implementasi SIPD belum berjalan sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam konsistensi input data antarbidang dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara maksimal. Beberapa staf yang bertugas menginput data keuangan masih menghadapi kesulitan dalam memahami alur sistem, sehingga sering terjadi keterlambatan pelaporan yang berdampak pada akurasi data anggaran secara keseluruhan. Penguatan pelatihan operasional SIPD secara berkala menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan digitalisasi keuangan berjalan sebagaimana mestinya.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Ekonomi

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam sebuah organisasi, termasuk instansi pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pengelolaan SDM yang efisien berarti menempatkan setiap pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya sehingga menghasilkan output kerja yang maksimal dengan biaya (dalam hal ini, biaya gaji dan operasional) yang optimal. Prinsip ini dikenal dalam teori ekonomi sebagai konsep *comparative advantage*, di mana setiap individu sebaiknya difokuskan pada pekerjaan yang menjadi keunggulan relatifnya dibandingkan dengan

pekerjaan lain. Di lingkungan PUPR Kota Parepare, penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu dicermati secara serius.

Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa struktur organisasi PUPR Kota Parepare telah dibagi ke dalam beberapa bidang teknis, antara lain Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Penataan Ruang, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh beberapa Kepala Seksi. Pembagian tugas secara struktural ini pada prinsipnya sudah mencerminkan upaya spesialisasi fungsi. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari, sering terjadi kondisi di mana pegawai harus mengerjakan tugas di luar bidang keahlian utamanya akibat keterbatasan jumlah tenaga pada bidang tertentu. Kondisi ini tidak hanya menurunkan efisiensi kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan teknis maupun administratif.

Dari sisi pengembangan kapasitas, ditemukan bahwa program pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai di PUPR Kota Parepare belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan. Pelatihan yang ada cenderung bersifat insidental dan lebih difokuskan pada aspek teknis infrastruktur, sementara pelatihan terkait kemampuan analisis ekonomi, manajemen anggaran, dan tata kelola organisasi masih sangat minim. Padahal, kemampuan ini sangat dibutuhkan mengingat semakin kompleksnya regulasi keuangan daerah dan tuntutan akuntabilitas publik yang terus meningkat. Investasi dalam pengembangan SDM merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang memberikan imbal hasil jangka panjang melalui peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan sumber daya (Setiawati et al., 2022).

Tabel 2. Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan Pengembangan SDM PUPR Parepare

Bidang	Kompetensi Dominan	Kebutuhan Penguatan	Prioritas
Bina Marga	Teknik jalan dan jembatan	Analisis anggaran infrastruktur, RAB berbasis data ekonomi	Tinggi
Cipta Karya	Konstruksi bangunan gedung	Manajemen proyek, analisis biaya-manfaat	Tinggi
Sumber Daya Air	Hidrologi dan irigasi	Perencanaan berbasis kebutuhan wilayah, data spasial	Sedang
Penataan Ruang	Tata ruang wilayah	Ekonomi wilayah, analisis dampak tata ruang terhadap perekonomian	Sedang
Sekretariat/Admin	Administrasi umum	Manajemen keuangan publik, SIPD, pelaporan akuntabel	Tinggi

Keterlibatan mahasiswa magang dari Program Studi Ekonomi Pembangunan memberikan nilai tambah tersendiri bagi instansi, terutama dalam aspek pengolahan data ekonomi, penyusunan laporan berbasis analisis, dan penguatan administrasi yang lebih sistematis. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena penempatan mahasiswa magang di PUPR belum disesuaikan dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki. Sebagian besar mahasiswa ditempatkan pada tugas-tugas administratif umum yang tidak spesifik berkaitan dengan bidang ekonomi, sehingga kontribusi intelektual mereka menjadi terbatas. Penyesuaian mekanisme penempatan magang agar lebih selaras dengan kebutuhan analitis instansi dan keahlian mahasiswa akan memberikan manfaat ganda: instansi memperoleh masukan berbasis keilmuan, sedangkan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan.

3. Ekonomi Pembangunan: Perencanaan Berbasis Data dan Kebutuhan Wilayah

Ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari proses transformasi struktural suatu wilayah dari kondisi kurang berkembang menuju kondisi yang lebih sejahtera, memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR. Infrastruktur, sebagai salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi, menjadi tanggung jawab utama PUPR untuk direncanakan, dibangun, dan dipelihara. Berdasarkan berbagai kajian empiris, terdapat hubungan positif yang signifikan antara ketersediaan infrastruktur berkualitas dengan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan konektivitas, dan penurunan biaya logistik yang pada akhirnya meningkatkan daya saing wilayah (Luthfi et al., 2024). Dengan demikian, setiap keputusan perencanaan pembangunan

infrastruktur di PUPR sesungguhnya adalah keputusan ekonomi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses perencanaan program pembangunan di PUPR Kota Parepare masih belum sepenuhnya mengintegrasikan data ekonomi wilayah sebagai basis pengambilan keputusan. Proses perencanaan lebih banyak diinisiasi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bersifat partisipatif, di mana usulan masyarakat dari tingkat kelurahan dan kecamatan dikompilasi dan diprioritaskan. Meskipun mekanisme ini memiliki keunggulan dalam hal keterwakilan aspirasi masyarakat, namun tanpa disertai analisis ekonomi yang memadai, terdapat risiko bahwa program yang diprioritaskan belum tentu merupakan program dengan dampak ekonomi terbesar bagi masyarakat. Pendekatan *evidence-based planning* yang mengintegrasikan data Musrenbang dengan analisis ekonomi wilayah akan menghasilkan prioritas pembangunan yang lebih optimal dan terukur (Fitri et al., 2024).

Aspek lain yang menjadi temuan penting adalah belum adanya sistem evaluasi dampak pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Setelah suatu proyek infrastruktur selesai dibangun, evaluasi yang dilakukan umumnya hanya terbatas pada aspek teknis seperti kesesuaian spesifikasi dan kepatuhan terhadap kontrak. Sementara itu, evaluasi terhadap dampak ekonomi jangka panjang dari proyek tersebut, seperti peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan aktivitas ekonomi di sekitar infrastruktur, penurunan biaya transportasi, atau peningkatan nilai lahan, hampir tidak pernah dilakukan secara sistematis. Padahal, evaluasi dampak ekonomi ini sangat penting tidak hanya untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai basis pembelajaran untuk perencanaan program-program berikutnya agar semakin efektif dan tepat sasaran (Iqbal et al., 2022).

Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pada tahun anggaran 2026, Dinas PUPR Kota Parepare menghadapi tekanan yang lebih besar untuk dapat menyusun prioritas program secara lebih cerdas dan terukur. Pemangkasan anggaran yang tidak diimbangi dengan restrukturisasi prioritas berbasis analisis ekonomi justru berpotensi mengorbankan program-program yang sebenarnya memiliki dampak sosial-ekonomi tinggi demi mempertahankan program yang nilai ekonominya lebih rendah namun secara politis lebih mudah dipertahankan. Oleh karena itu, pengembangan matriks prioritas pembangunan yang mempertimbangkan empat dimensi utama manfaat ekonomi, dampak sosial, urgensi teknis, dan kesiapan anggaran menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan dalam sistem perencanaan PUPR Kota Parepare.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana ilmu ekonomi, khususnya manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan ekonomi pembangunan, diimplementasikan dalam lingkungan kerja pemerintahan. Melalui keterlibatan langsung pada berbagai kegiatan seperti proses penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi proyek, serta analisis kebutuhan pembangunan infrastruktur, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme birokrasi serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Berbagai tantangan seperti ketidaksesuaian bidang keilmuan dengan penempatan tugas, keterbatasan akses data, dan minimnya pemahaman awal terkait prosedur administrasi dapat teratasi melalui komunikasi yang baik serta pendampingan dari pembimbing lapangan. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini membuktikan bahwa integrasi ilmu ekonomi dalam sektor pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan akuntabel.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian ke lebih banyak bidang dalam Dinas PUPR agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan ilmu ekonomi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang lebih beragam, seperti pendekatan mixed-method, dapat memberikan data yang lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat melakukan perbandingan antar-instansi atau antar-daerah untuk melihat perbedaan penerapan prinsip ekonomi dalam pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan pembangunan. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai efektivitas implementasi ilmu ekonomi dalam sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, S. A., Simatupang, R. S. N., Mauliza, N., & Mariana, M. (2024). Evaluasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 337-344. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1386>
- Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(2), 173-185. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.11192>
- Luthfi, M. I., Bashir, A., & Sukanto, S. (2024). Identifikasi pengaruh infrastruktur publik dan ketimpangan pendapatan per kapita terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumbagsel tahun 2013-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 235-242. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art14>
- Nurhumaerah, Mas'ud, A., & Kalsum, U. (2023). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari. *Indonesian Journal of Management and Accounting (IJMA)*, 4(2), 221-232. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).221-235](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).221-235)
- Rahmadi, R. (2025). Transformasi digital manajemen SDM di instansi pemerintah: Adaptasi, tantangan, dan peluang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 7(1). <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/5174>
- Setiarini, H., Prabowo, H., Sutrisno, S., & Gultom, H. C. (2022). Pengaruh soft skill dan pengalaman magang kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 195-204. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v10i2.941>